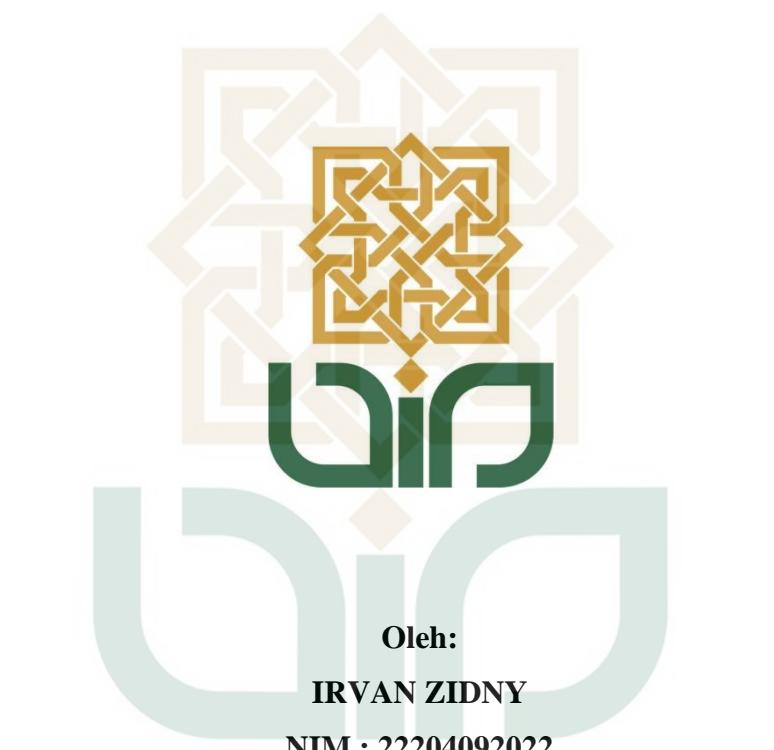


**PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPRASIONAL SATUAN
PENDIDIKAN (BOSP) MADRASAH TAHUN 2024 DALAM
MENGEMBANGKAN MADRASAH IBTIDAIAH AZ-ZAHRA DESA
SUKAMAJU KEC BABAT SUPAT KAB MUSI BANYUASIN SUMATERA
SELATAN**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Diajukan Kepada Program Magister UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh

Gelar Magister Pendidikan
Program Studi Manajemen Pendidikan Islam

YOGYAKARTA

2025

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 513056 Fax. (0274) 586117 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1247/Un.02/DT/PP.00.9/05/2025

Tugas Akhir dengan judul : PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPRASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP) MADRASAH TAHUN 2024 DALAM MENGBANGKAN MADRASAH IBTIDAIAH AZ-ZAHRA DESA SUKAMAJU KEC BABAT SUPAT KAB MUSI BANYUASIN SUMATERA SELATAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IRVAN ZIDNY, S.Pd
Nomor Induk Mahasiswa : 22204092022
Telah diujikan pada : Rabu, 28 Mei 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Nur Saidah, S. Ag., M. Ag
SIGNED

Valid ID: 684a7a9c19f09



Pengaji I

Prof. Dr. Subiyantoro, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68527ecccc93b



Pengaji II

Dr. H. Karwadi, S.Ag, M.Ag
SIGNED

Valid ID: 68529faa4405



Yogyakarta, 28 Mei 2025

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Prof. Dr. Sigit Purnama, S.Pd.I., M.Pd.
SIGNED

Valid ID: 68527fe43ccdc

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Irvan Zidni

NIM: 22204092022

Jenjang: Magister (S2)

Program Studi: Manajemen Pendidikan Islam

Dengan ini menyatakan bahwa tesis saya yang berjudul:

"Pengelolaan Kebijakan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Madrasah

Tahun 2024 dalam Mengembangkan Madrasah Ibtidaiah Az-Zahra Babat Supat"

adalah hasil karya asli saya sendiri. Seluruh kutipan, ide, atau referensi yang digunakan telah saya cantumkan sumbernya secara jelas dan sesuai dengan kaidah akademik yang berlaku. Saya sepenuhnya bertanggung jawab atas isi dan keaslian karya ini.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa karya ini mengandung unsur plagiasi, baik sebagian maupun seluruhnya, saya siap menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 21 Januari 2025

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**



Irvan Zidni

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Irvan Zidni
NIM: 22204092022
Jenjang: Magister (S2)
Program Studi: Manajemen Pendidikan Islam

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang berjudul:

**"Pengelolaan Kebijakan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Madrasah
Tahun 2024 dalam Mengembangkan Madrasah Ibtidaiah Az-Zahra Babat Supat"**

adalah hasil karya asli saya sendiri. Karya ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di perguruan tinggi atau lembaga mana pun, baik sebagian maupun seluruhnya. Semua sumber yang digunakan dalam penulisan tesis ini telah saya cantumkan secara jelas sesuai dengan kaidah akademik yang berlaku.

Saya bertanggung jawab sepenuhnya atas keaslian karya ini. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa tesis ini bukan hasil karya asli saya atau terdapat pelanggaran hak cipta, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 21 Januari 2025

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Irvan Zidni

NOTA DINAS PEMBIMBING

NOTA DINAS PEMBIMBING

Yth.
Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah
dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPRASIONAL SATUAN
PENDIDIKAN (BOSP) MADRASAH TAHUN 2024 DALAM
MENGEMBANGKAN MADRASAH IBTIDAIAH AZ-ZAHRA DESA
SUKAMAJU KEC BABAT SUPAT KAB MUSI BANYUASIN SUMATERA
SELATAN**

yang ditulis oleh:

Nama : Irvan Zidny
NIM : 22204092022
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam

Peneliti berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada program Magister (S2) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Pendidikan (M.Pd). Wassalamualaikum wr.wb.

Yogyakarta, 21 Januari 2025

Pembimbing,



Dr. Nur Saidah, S.Ag., M.Ag.,

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَقْسِحُوا فِي الْمَجَlisِ فَافْسُحُوا يَفْسِحَ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ اذْشُرُوا فَادْشُرُوا يَرَفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أَوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجَتٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرٌ ﴿١١﴾ (المجادلة: ١١)

11. Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “Berdirilah kamu,” maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan. (Al-Mujadalah/58:11)¹

Penjelasan Relevansi Ayat dengan Judul Tesis:

- Pentingnya Ilmu dan Pendidikan:** Ayat ini menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dan pendidikan dalam Islam. Madrasah Ibtidaiyah Az-Zahra Babat Supat sebagai lembaga pendidikan Islam memiliki peran penting dalam mencerdaskan anak-anak dan membentuk generasi yang beriman dan berilmu. Bantuan operasional (BOSP) yang dikelola dengan baik akan mendukung proses pendidikan yang berkualitas.
- Tanggung Jawab Pengelolaan:** Ayat ini juga mengingatkan bahwa Allah Maha Mengetahui segala yang dikerjakan manusia. Hal ini relevan dengan pengelolaan BOSP, di mana pengelola harus bertanggung jawab dan transparan dalam menggunakan dana untuk kemaslahatan pendidikan.
- Peningkatan Derajat melalui Ilmu:** Madrasah Ibtidaiyah Az-Zahra Babat Supat bertujuan untuk meningkatkan derajat peserta didik melalui ilmu pengetahuan dan keimanan. Ayat ini mendorong agar kebijakan dan pengelolaan BOSP diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut.
- Keadilan dan Transparansi:** Dalam konteks pengelolaan dana, ayat ini mengingatkan bahwa Allah Maha Mengetahui segala tindakan manusia. Oleh karena itu, pengelolaan BOSP harus dilakukan dengan adil, transparan, dan bertanggung jawab.

¹ Terjemah Kemenag 2002 (Al-Mujadalah/58:11).

ABSTRAK

Irwan Zidny, 22204092022, Pengelolaan Dana Bantuan Oprasional Satuan Pendidikan (Bosp) Madrasah Tahun 2024 Dalam Mengembangkan Madrasah Ibtidaiah Az-Zahra Desa Sukamaju Kec Babat Supat Kab Musi Banyuasin Sumatera Selatan. Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2024.

Penelitian ini di dasari oleh pengelolaan dana BOSP yang sesuai dengan rencana dan petunjuk teknis yang di lakukan oleh jajaran pengurus MI Az-Zahra walaupun terdapat kendala administrasi dan proses pencairan dana BOSP yang terkadaan mengalami kendala. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengelolaan kebijakan BOSP tahun 2024 di MI Az-Zahra Babat Supat serta menganalisis faktor keberhasilan kebijakan tersebut terhadap pengembangan madrasah.

Untuk mengamati permasalahan ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Pengelolaan kebijakan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOS) 2024 di MI Az Zahra Babat Supat mencakup tahapan pengajuan, verifikasi, pencairan, penggunaan dana sesuai rencana anggaran, dan pelaporan transparan untuk memastikan efisiensi dan akuntabilitas. 2) Keberhasilan kebijakan ini didukung oleh perencanaan kolaboratif, transparansi, pengelolaan yang akuntabel, pengembangan pembelajaran dan kompetensi guru, serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan penyelesaian tantangan pengelolaan dana.

Kata kunci: Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), Pengelolaan Dana, Madrasah Ibtidaiah Az-Zahra, Pengembangan Madrasah.

ABSTRACT

Irvan Zidny, 22204092022, Management of Educational Operational Assistance Funds (BOSP) for Madrasahs in 2024 in Improving the Quality of Human Resources at Madrasah Ibtidaiyah Az-Zahra, Sukamaju Village, Babat Supat District, Musi Banyuasin Regency, South Sumatra. Study Program: Islamic Education Management, Faculty of Tarbiyah and Teacher Training, UIN Sunan Kalijaga, 2024.

This research is based on the management of BOSP funds at MI Az-Zahra, which has been carried out in accordance with the plan and technical guidelines by the madrasah administrators, despite administrative challenges and occasional obstacles in the BOSP fund disbursement process. The study aims to explain the management of the 2024 BOSP policy at MI Az-Zahra Babat Supat and analyze the success factors of this policy in supporting the development of the madrasah.

To see these issues, the researcher employed a descriptive qualitative approach. Data collection was conducted through interviews, observations, and documentation. Data analysis involved data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of this study are: 1) The management of the Education Operational Assistance Policy (BOSP) in 2024 at MI Az-Zahra Babat Supat includes the stages of application, verification, disbursement, use of funds according to the budget plan, and transparent reporting to ensure efficiency and accountability. 2) The success of this policy is supported by collaborative planning, transparency, accountable management, development of learning and teacher competencies, and community participation in monitoring and addressing the challenges of fund management.

Keywords: *Education Operational Assistance (BOSP), Fund Management, Madrasah Ibtidaiyah Az-Zahra,*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan tesis ini yaitu pedoman transliterasi yang berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987. Berikut adalah daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	£	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha'	¥	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	©	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	ı	es (dengan titik di bawah)

ض	dad	«	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	-	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	§	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	ghain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	waw	W	W
ه	ha’	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعددة عدة	ditulis ditulis	<i>Muta‘addidah ‘iddah</i>
---------------	--------------------	--------------------------------

C. Ta’ Marbutah

1. Bila dimatikkan ditulis h

هبة جزية	ditulis ditulis	<i>hibbah Jizyah</i>
----------	--------------------	--------------------------

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan kata speneliting “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الوليا	Ditulis	<i>Karāmah alauliyā`</i>
--------------	---------	--------------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakātul fi-r</i>
------------	---------	---------------------

D. Vokal Pendek

-	<i>fa-ṣyah</i>	A
-	<i>Kasrah</i>	I
-	«amah	U

E. Vokal Panjang

fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyyah</i>
fathah + ya' mati نسى	ditulis ditulis	ā <i>tansā</i>
kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	ī <i>karīm</i>
dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū <i>furuū`</i>

F. Vokal Rangkap

fathah + ya mati بینک	ditulis ditulis	<i>Ai</i> <i>bainakum</i>
fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	<i>au qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

الْتَّم اعْدَتْ لَنْ شَكَرْتَمْ	ditulis ditulis Ditulis	<i>a`antum</i> <i>u'idat</i> <i>la'in syakartum</i>
---------------------------------------	-------------------------------	---

H. Kata Sambung Alif + Lam

1. Bila diikuti Huruf Qamariyah

الْقُرْآن الْقِيَاس	ditulis ditulis	<i>alQur`ān</i> <i>alQiyās</i>
------------------------	--------------------	-----------------------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggantikan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya

السَّمَاء الشَّمْس	ditulis ditulis	<i>alSamā`</i> <i>alSyams</i>
-----------------------	--------------------	----------------------------------

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkain Kalimat

زَوْيِ الْفَرْوَضَا هَلْ السَّنَة	Ditulis ditulis	<i>zawī alfuriū«</i> <i>hal alsunnah</i>
--------------------------------------	--------------------	---

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat, kesempatan, kekuatan, dan ilmu pengetahuan yang telah diberikan, serta atas cinta yang penuh kesabaran yang mengiringi hingga terselesaiannya karya ini tepat waktu. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pencapaian ini tidak lepas dari bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak yang luar biasa. Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Sigit Purnama, selaku Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Nur Saidah, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Irwanto, M.Pd., selaku Sekretaris Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Dr. Nur Saidah, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk memberikan arahan, kritik, dan saran secara teliti sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
6. Seluruh dosen Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam yang telah memberikan ilmu, wawasan, dan pengalaman selama masa perkuliahan.
7. Kedua orang tua yang senantiasa mendoakan, memberikan dukungan moral, dan motivasi tanpa henti. Kasih sayang dan pengorbanan mereka adalah sumber kekuatan terbesar penulis.
8. Civitas MI Az-Zahra Babat Supat yang telah memberikan izin penelitian dan bersedia menjadi narasumber.

9. Rekan-rekan Magister Manajemen Pendidikan Islam, yang telah mendampingi, berbagi perjuangan, berdiskusi, dan memberikan dukungan sepanjang proses ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung, yang telah memberikan kontribusi pemikiran, pengalaman, serta dukungan lainnya demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan tesis ini.

Sebagai penutup, penulis ingin menyampaikan rasa syukur yang mendalam kepada semua pihak atas dukungan dan kontribusi berharga yang telah diberikan selama proses penelitian dan penulisan ini. Setiap langkah dalam penyusunan karya ini merupakan hasil dari kerja keras dan komitmen bersama. MI Az-Zahra Babat Supat telah menunjukkan dedikasi yang luar biasa dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui pendekatan yang sistematis dan reflektif.

Penulis berharap temuan dan analisis dalam karya ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan kebijakan pendidikan di masa mendatang serta manfaat nyata bagi komunitas pendidikan. Semoga karya ini dapat menginspirasi dan menjadi referensi yang bermanfaat bagi para pembaca, peneliti, dan praktisi di bidang pendidikan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 21 Januari 2024



Irvan Zidny

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Kerangka Teori	15
G. Metodologi Penelitian	32
H. Sistematika Penulisan	41
BAB II	44
GAMBARAN UMUM MI AZ-ZAHRA	44
A. Latar Belakang MIS Az-Zahra	44
B. Visi, Misi, dan Tujuan	46
C. Data Madrasah	49
BAB III PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN 2024 DI MI AZ ZAHRA BABAT SUPAT	54
A. Pengajuan Permohonan	58
B. Verifikasi dan Validasi Data	69
C. Pencairan Dana	78
D. Penggunaan Dana	82
E. Pelaporan Pertanggungjawaban	85

1. Transparansi dan Sistem Pelaporan Dana BOSP	86
2. Evaluasi dan Pengawasan Penggunaan Dana BOSP	88
3. Kendala dan Solusi dalam Pengelolaan Dana BOSP	90
4. Manfaat dan Dampak Kebijakan BOSP	92
5. Inovasi dan Harapan untuk Pengelolaan Dana BOSP ke Depan	94
BAB IV FAKTOR KEBERHASILAN KEBIJAKAN BOSP TAHUN 2024 TERHADAP PENGEMBANGAN MI AZ ZAHRA BABAT SUPAT	96
A. Peningkatan Kualitas SDM di Madrasah	98
B. Peningkatan Mutu Pembelajaran di Madrasah	101
1. Pemenuhan Kebutuhan Pembelajaran	101
2. Pengembangan Teknologi Pembelajaran	106
C. Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran di Madrasah	108
D. Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Tata Kelola Madrasah	109
1. Perencanaan yang Melibatkan Berbagai Pihak	109
2. Penggunaan Dana yang Transparan dan Akuntabel	113
E. Peningkatan Partisipasi dan Dukungan Masyarakat dalam Pengembangan Madrasah	116
1. Dukungan untuk Siswa yang Kurang Mampu	116
2. Keterlibatan Masyarakat dalam Pengawasan	117
BAB V	121
PENUTUP	121
A. Kesimpulan	121
B. Saran	122
DAFTAR PUSTAKA	124
LAMPIRAN	127

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Luas Lahan MI Az-Zahra.....	48
Tabel 2.2 Penggunaan Lahan MI Az-Zahra.....	48
Tabel 2.3 Daftar Sarana MI Az-Zahra.....	56



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Konsep Kerangka Teori Penelitian.....	34
Gambar 2.1 Struktur Organisasi.....	53
Gambar 3.1 Bukti Partisipasi Guru dalam Perencanaan RAB.....	72
Gambar 3.2 Peta Konsep Kerangka Verifikasi dan Validasi Penggunaan Dana.....	76
Gambar 3.3 Dokumen LPJ Penggunaan Dana BOS.....	92
Gambar 3.4 Rapat Evaluasi Penggunaan Dana BOS.....	95
Gambar 3.5 Fasilitas Pembelajaran MI Az-Zahra.....	100
Gambar 4.1 Pelatihan Teknologi Pembelajaran.....	109
Gambar 4.2 Antusiasme Belajar siswa MI Az-Zahra.....	112
Gambar 4.3 Prestasi Murid di MI Az-Zahra.....	114
Gambar 4.4 Petunjuk Teknis BOS 2024.....	123



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Amanat pemerataan pendidikan tidak serta merta membawa perubahan kualitas pendidikan. Fakta pendidikan Indonesia pada tahun 2015 masih mendapatkan peringkat 10 dari bawah dari 79 negara. Itu menunjukkan bahwa kualitas pendidikan Indonesia jauh dari kata baik. Ironi terus berlanjut, apabila dibandingkan pada hasil studi Programme for International Student Assessment (PISA) 2018 memperlihatkan penurunan kualitas pendidikan di mana Indonesia menempati peringkat ke-6 dari bawah (74) dengan skor rata-rata 371 turun dari peringkat 64 pada tahun 2015. Ini menunjukkan bahwa program yang dilakukan pemerintah kontraproduktif dan belum menunjukkan peningkatan. Kemampuan literasi, matematika, dan sains siswa Indonesia masih berada di bawah rata-rata (Organization for Economic Cooperation and Development) OECD.²

Berkembangnya waktu, respon atas persoalan pendidikan sedikit demi sedikit mulai menghembuskan angin segar. Dengan adanya Program Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Program ini bertujuan memberikan akses perbaikan pendidikan seluas-luasnya bagi masyarakat, sehingga terwujudnya pendidikan yang berkeadilan dan bermutu, serta mampu

² Fransisxa Nur'aini and others, *Meningkatkan Kemampuan Literasi Dasar Siswa Indonesia Berdasarkan Analisis Data PISA 2018*, Pusat Penelitian Kebijakan, 3, 2021, 2.

meningkatkan kualitas dalam pembelajaran dengan menerapkan prinsip fleksibelitas, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, transparansi.³

Tujuan dari Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) adalah stimulus operasional untuk meningkatkan kualitas pendidikan, mengacu pada Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dengan memberikan kebebasan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing sekolah. Dalam Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 1801 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah, telah diatur berdasarkan komponen pembiayaan diantaranya: Kegiatan Pembelajaran, Ekstrakurikuler, Evaluasi Pembelajaran dan Ekstrakurikuler, pengembangan potensi siswa, pengembangan keprofesian guru dan tenaga kependidikan, serta pengembangan menejemen sekolah, Pembayaran honor rutin guru, pemeliharaan sarana dan prasarana madrasah, pengembangan perpustakaan, kegiatan PPDB, Masa Ta'aruf MATSAMA, Pengelolaan Madrasah, langganan daya dan jasa, pembelian alat multi media media pembelajaran, Pembiayaan lain.⁴

Pengembangan madrasah bisa terealisasi dengan pengelolaan dana BOS yang baik dan tepat sasaran. Merujuk pada teori diatas dapat dilihat bagaimana langkah-langkah yang dilakukan dalam mengelola dana BOS. Pengelolaan dana

³ Meyga Hidayah Wiranti Mulya and Tjitjik Rahaju, *Evaluasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di Surabaya*, Publika, 9.3 (2021), 181–94
<<https://doi.org/10.26740/publika.v9n3.p181-194>>.

⁴ Dirjen Pendis, *Juknis Bos Perubahan 2020.Pdf*
<<https://drive.google.com/file/d/1ocf4fgpVFJMYx4MRJ1IX7QiU4deXyyNr/view>>.

operasional sekolah merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga keberlangsungan dan kualitas pendidikan. Namun, seringkali terdapat keterlambatan pencairan dana.⁵

Faktor penyebab keterlambatan pencairan dana BOS meliputi: (1) komunikasi tidak efektif antara sekolah dengan pemerintah daerah/provinsi yang saling menyalahkan terkait pelaporan dan respons keluhan; (2) keterbatasan SDM pengelola dana di tingkat daerah, baik secara kuantitas maupun kualitas, yang menghambat verifikasi data dan administrasi, ditambah absennya mekanisme darurat; (3) disposisi birokrat kurang mendukung berupa sikap tidak responsif, minim komitmen, dan ketidakpedulian terhadap keluhan sekolah; serta (4) struktur birokrasi rumit dengan prosedur berbelit di tingkat pusat-provinsi-kabupaten, mekanisme kompensasi triwulan yang tidak solutif, dan kurangnya fleksibilitas penanganan kasus khusus. Keempat faktor ini saling berkaitan, menciptakan bottleneck dalam implementasi kebijakan BOS, sebagaimana terlihat pada kasus SMA Negeri 1 Halmahera Utara.⁶

Madrasah Ibtidaiah Az-Zahra Babat Supat adalah salah satu madrasah tingkat dasar yang menjadi pilihan utama orang tua dalam menyekolahkan anak-anak mereka. MI Az Zahra adalah lembaga pendidikan yang menawarkan keseimbangan antara peningkatan kompetensi peserta didik dalam bidang akademik dan karakteristik religius melalui sejumlah program yang telah

⁵ Wawancara dengan Irham Khumaidi selaku Kepala Sekolah MI Az-Zahra pada 1 Desember 2024 di Babat Supat, Sumatera Selatan

⁶ Deiby Christiana Tinggogoy, "Analisis Dampak Implementasi Kebijakan Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Studi di SMA Negeri 1 Halmahera Utara)," *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN* (2019): 55.

dirancang, dengan contoh Pengelolaan BOSP di Madrasah Ibtidaiah Az-Zahra Babat Supat telah berdampak positif pada peningkatan kualitas pendidikan. Dana yang disalurkan memungkinkan pengadaan bahan ajar yang lebih modern dan relevan, serta peningkatan pelatihan untuk guru. Dengan adanya sumber daya yang lebih baik, guru dapat mengimplementasikan metode pembelajaran yang lebih efektif, dan siswa mendapatkan akses ke materi yang lebih beragam dan berkualitas tinggi. Selain itu, pelatihan yang diterima oleh guru meningkatkan keterampilan mereka dalam menggunakan metode pengajaran yang inovatif, sehingga menghasilkan pengalaman belajar yang lebih memuaskan dan efektif. Selain itu, MI Az Zahra juga termasuk dalam lembaga pendidikan yang menerima Bantuan Operasional Sekolah di Kecamatan Babat Supat, Kabupaten Musi Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan.⁷

Madrasah Ibtidaiah Az-Zahra Babat Supat telah mengalami perkembangan berkat adanya kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Hal ini didukung oleh keberadaan tim pengelola dana BOS yang kompeten. Pengelolaan dana BOS di MI Az-Zahra Babat Supat telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang diterbitkan pemerintah. Sehingga, penyediaan sarana prasarana, kesejahteraan guru, perawatan madrasah, dan pengembangan peserta didik setiap tahunnya dapat berjalan dengan lancar. Adapun kendala yang belum dapat dimaksimalkan seperti MI Az-Zahra, menghadapi masalah dengan infrastruktur teknologi yang terbatas, hasil temuan di lapangan yaitu laptop yang digunakan.

⁷ Hasil wawancara dengan Kepala Madrasah Bapak Irham khumaidi Pada tanggal 6 januari 2024 di MI Az-zahra.

Meskipun BOSP mencakup pengadaan perangkat teknologi, penerapan dan integrasi teknologi tersebut sering kali terhambat oleh kekurangan pelatihan bagi guru atau kendala teknis di lapangan. Adapun tekadang alokasi dana BOSP belum sesuai dengan kebutuhan aktual madrasah. Misalnya, dana yang diterima mungkin lebih besar untuk pengembangan fisik tetapi kurang untuk pembelian bahan ajar atau pelatihan guru, yang padahal mungkin lebih mendesak.

Selain kendala yang telah disebutkan sebelumnya terkait keterbatasan infrastruktur teknologi, MI Az-Zahra Babat Supat juga menghadapi tantangan dalam pengadaan perangkat laptop yang dibeli secara kredit dan dalam kondisi bekas. Kebijakan ini diambil sebagai solusi darurat untuk memenuhi kebutuhan teknologi dengan anggaran terbatas, namun justru menimbulkan konsekuensi baru yang memengaruhi efektivitas program digitalisasi madrasah. Pembelian secara kredit menyebabkan madrasah terbebani oleh cicilan bulanan yang sebenarnya dapat dialokasikan untuk kebutuhan lain seperti pelatihan guru atau pengembangan kurikulum. Sementara itu, penggunaan laptop bekas sering kali tidak sesuai dengan tuntutan pembelajaran digital karena keterbatasan spesifikasi dan rentannya kerusakan, sehingga justru menghambat proses belajar-mengajar yang seharusnya difasilitasi oleh teknologi tersebut.⁸

Dampak dari kebijakan ini semakin terasa ketika dikaitkan dengan upaya peningkatan kompetensi guru berbasis teknologi. Pelatihan yang telah dijalankan tidak bisa dimaksimalkan karena perangkat yang tersedia tidak

⁸ Wawancara dengan Irham Khumaidi selaku Kepala Sekolah MI Az-Zahra pada 1 Desember 2024 di Babat Supat, Sumatera Selatan

mendukung aplikasi pembelajaran modern atau sering mengalami gangguan teknis. Hal ini berpotensi menurunkan motivasi guru dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran, padahal salah satu tujuan utama alokasi dana BOSP adalah menciptakan lingkungan belajar yang lebih interaktif dan relevan dengan era digital. Selain itu, beban finansial akibat pembelian kredit mengurangi fleksibilitas madrasah dalam merespons kebutuhan mendesak lainnya, seperti perawatan sarana fisik atau penyediaan bahan ajar.⁹

Kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pengadaan teknologi di MI Az-Zahra. Solusi jangka pendek seperti pembelian laptop bekas atau kredit justru dapat menciptakan inefisiensi anggaran jangka panjang. Madrasah perlu mempertimbangkan skema pendanaan yang lebih berkelanjutan, seperti kerja sama dengan pihak ketiga atau mengajukan bantuan khusus untuk pengadaan perangkat teknologi, agar investasi di bidang pendidikan benar-benar berdampak optimal pada peningkatan mutu pembelajaran. Dengan demikian, integrasi TIK yang menjadi salah satu indikator pengembangan madrasah dapat tercapai tanpa mengorbankan aspek-aspek penting lainnya dalam pengelolaan dana BOSP.¹⁰

Berdasarkan persoalan di atas, dalam padangan penulis perlu melakukan penelitian apakah dengan lahirnya Juknis BOS baru membawa pengaruh bagi madrasah dalam mengembangkan kualitasnya ataukah ada problematika lain yang membawa pengaruh negatif perkembangan lembaga pendidikan.

⁹ Wawancara dengan Irham Khumaidi selaku Kepala Sekolah MI Az-Zahra pada 1 Desember 2024 di Babat Supat, Sumatera Selatan

¹⁰ Wawancara dengan Irham Khumaidi selaku Kepala Sekolah MI Az-Zahra pada 1 Desember 2024 di Babat Supat, Sumatera Selatan

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengelolaan kebijakan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Madrasah tahun 2024 di MI Az Zahra Babat Supat?
2. Apa Faktor Keberhasilan Kebijakan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Madrasah tahun 2024 terhadap pengembangan MI Az Zahra Babat Supat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan Penjelasan Pengelolaan kebijakan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Madrasah tahun 2024 di MI Az Zahra Babat Supat
2. Menganalisa Faktor Keberhasilan Kebijakan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Madrasah tahun 2024 terhadap pengembangan MI Az Zahra Babat Supat.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan kegunaan penelitian ini dapat dilihat dalam dua dimensi, pertama, manfaat teoritis dan kedua, manfaat praktis dengan diuraikan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Manfaat teoritik dalam penelitian ini yaitu mampu memberikan kontribusi pengetahuan sekaligus pemikiran yang berdasar pada konsensus penelitian ilmiah kepada pembaca sekaligus penggiat pendidikan, sehingga bisa menambah referensi ilmiah dalam perkembangan wawasan pengelolaan pendidikan terkhusus dalam pengelolaan Bantuan Oprasional Sekolah.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat secara praktis dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan teoris sekaligus praktis kepada pemerintah terkait konsepsi kebijakan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Tahun 2024.
2. Hasil penelitian, diharapkan dapat menjadi salah satu dari sekian banyak rujukan pihak sekolah dalam mengidentifikasi problem yang dihadapi madarasah dalam implementasi kebijakan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).
3. Bagi peneliti memenuhi syarat dalam melangsungkan tesis.

E. Penelitian Terdahulu

1. Tesis Berjudul “Implementasi Kebijakan BOS Reguler SMP Negeri di Kabupaten Sumedang” yang di tulis oleh Linda Rosmawati Fatimah. Dalam kajiannya Linda menjelaskan bahwa pemerataan kesempatan mendapatkan pendidikan merupakan salah satu yang menentukan keberhasilan pembangunan Sumber Daya Manusia. Salah satu upaya pemerataan

pendidikan adalah kebijakan BOS Reguler. Oleh karena itu, implementasi kebijakan BOS menjadi salah satu prasyarat keberhasilan pembangunan SDM.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan dan mengetahui faktor penghambat keberhasilan implementasi kebijakan. Lebih jauh peneliti berupaya mengetahui cara mengatasi hambatan implementasi kebijakan BOS Reguler SMP Negeri di Kabupaten Sumedang. Sedangkan desain penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi.

2. Artikel dengan Judul: Analisis Konsep Kebijakan Publik Studi Kasus Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol. 5 No. 2 Tahun 2021, ditulis oleh Sri Devi Monica. Dalam Penelitiannya Sri Devi Monica berfokus kepada mengetahui konsep pelaksanaan dan aspek yang mempengaruhi kebijakan publik program Dana BOS, dengan rumuskan masalah: “Bagaimana pelaksanaan Kebijakan Publik?” dan “Apa sajakah aspek yang mempengaruhi kebijakan Publik?”. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Devi adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Menghasilkan kesimpulan bahwa Kebijakan BOS disatu sisi membantu sekolah negeri/swasta dalam pembiayaan operasional. Dana BOS juga membantu orang tua dalam membiayai sekolah. Terdapat beberapa hal yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakan, antara lain: 1) Komunikasi, 2) Sumber Daya, 3) Disposisi, 4) Struktur

Birokrasi.¹¹

Perbedaan penelitian Sri Devi dengan penelitian dapat dipetakan sebagai berikut: Pertama; Sri Devi tidak memberikan penjelasan Filosofis perubahan kebijakan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan. Sedangkan peneliti memberikan penjelasan secara filosofis perubahan kebijakan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) termasuk BOSP Tahun 2023. Kedua; penulis belum menemukan identifikasi problem pengelolaan bos secara konseptual saja, sedangkan peneliti Mengidentifikasi problem yang dihadapi sekolah dalam mengimplementasikan kebijakan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) secara konseptual dan implikasinya bagi madrasah di Kecamatan Babat Supat. Ketiga; Perbedaan tempat penelitian tentu probel dan karakteristik penyelesaian berbeda.

3. Artikel dengan Judul: Analisis Prisip-Prinsip Pengelolaan Dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) Reguler dalam Program Merdeka Belajar dalam Jurnal Widya Accarya: Jurnal Kajian Pendidikan FKIP Universitas Dwijendra Vol XX No X, tahun Oktober 2022. Dalam Penelitian yang dilakukan oleh I Made Astra Winaya dkk., berfokus untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip fleksibilitas, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana BOS pada Tahun Anggaran 2021 di SD Negeri 1 Selanbawak.

Hasil penelitian I Made Astra menunjukan bahwa pengelolaan dana

¹¹ Sri Devi Monica, ‘Analisis Konsep Kebijakan Publik (Studi Kasus Bantuan Dana Operasional Sekolah (BOS)’, *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 5.2 (2022), 155–66 <<https://doi.org/10.25139/jmnegara.v5i2.3396>>.

BOS SD Negeri 1 Selanbawak telah taat juknis sebagimana Permendikbud No. 6 Tahun 2021, tertib administrasi dengan prinsip fleksibilitas, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi, dalam perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban dana BOS. Namun, ada beberapa kendala yang dihadapi sekolah yaitu keterbatasan sumber daya manusia sehingga optimalnya keterlibatan komite dalam perencanaan, pengelolaan dana BOS, dan kurangnya inovasi.¹²

Perbedaan substansial antara I Made Astra dengan Peneliti adalah bahwa fokus kajian penelitian I Made Astra lebih pada penelitian dalam prinsip ketaatan dalam pengelolaan BOS yang bertujuan untuk mengetahui optimalisasi penggunaan dana BOS di SDN 1 Selanbawak sedangkan penulis lebih menekankan pada kajian kebijakan dan pengaruhnya terhadap madrasah swasta di Babat Supat.

4. Artikel dengan Judul “Kebijakan Kontroversial Mengenai Dana Bos 2021” penelitian yang ditulis oleh Niken Ayu Hestina dan Dea Melinda. Dimana dalam awal kajiannya mempertanyakan kebijakan dana BOS tahun 2021 yang menurutnya kontroversial. Poin tentang batas minimal 60 siswa dalam 3 tahun terakhir menjadi bomerang bagi sebagian sekolah. Tentu bertolak belakang tujuan awal BOS sebagai tindakan langsung pemerintah dalam membantu dalam meringankan beban biaya Pendidikan yang diperlukan dalam menyelesaikan program wajar 9 tahun berkualitas. Kebijakan politik

¹² I Made Astra Winaya and others, ‘Analisis Prisip-Prinsip Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Dalam Program Merdeka Belajar’, *Widya Accarya*, 13.2 (2022), 133–44 <<https://doi.org/10.46650/wa.13.2.1277.133-144>>.

pendidikan diharapkan dapat membantu menangani masalah rakyat kecil.¹³

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Dana BOS diimplementasikan untuk menyediakan bantuan untuk sekolah dalam tujuan membebaskan dan meringankan biaya pendidikan sebagaimana pasal 31, yaitu; 1) setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan (2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah harus membiayainya". Tentu petunjuk teknis pengelolaan bantuan operasional sekolah (BOS) reguler yang diteken mendikbud ristek Nadiem Makarim pada 12 Februari 2021, secara prinsip sudah melanggar undang-undang.¹⁴

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang Peneliti sebutkan, berikut adalah posisi dan kontribusi penelitian Peneliti dalam konteks kajian kebijakan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dan pengaruhnya terhadap madrasah, khususnya Madrasah Ibtidaiyah Az-Zahra Babat Supat:

1. Posisi Penelitian Peneliti

Penelitian Peneliti menempati posisi sebagai studi yang fokus pada kebijakan BOSP dan implementasinya di madrasah swasta, khususnya di Kecamatan Babat Supat. Beberapa aspek yang membedakan penelitian Peneliti dengan penelitian terdahulu adalah:

¹³ Niken Ayu Hestina and Dea Melinda, *Kebijakan Kontroversial Mengenai Dana Bos 2021*, Jurnal Pendidikan Dasar Dan Keguruan, 7.1 (2022), 25–29 <<https://doi.org/10.47435/jpdk.v7i1.994>>.

¹⁴ Hestina, N. A., & Melinda, D. (2022). KEBIJAKAN KONTROVERSIAL MENGENAI DANA BOS 2021. *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Keguruan*, 7(1), 25-29. <https://doi.org/10.47435/jpdk.v7i1.994>

- a. Fokus pada Madrasah Swasta: Penelitian terdahulu lebih banyak membahas implementasi BOS/BOSP di sekolah negeri (seperti SMP Negeri di Kabupaten Sumedang atau SD Negeri 1 Selanbawak). Sementara itu, penelitian Peneliti mengkhususkan diri pada madrasah swasta, yang memiliki karakteristik dan tantangan berbeda.
- b. Kajian Filosofis Kebijakan: Peneliti memberikan penjelasan filosofis tentang perubahan kebijakan BOSP, termasuk BOSP Tahun 2023. Hal ini tidak ditemukan dalam penelitian Sri Devi Monica atau I Made Astra Winaya.
- c. Identifikasi Problem secara Konseptual dan Implikatif: Peneliti tidak hanya mengidentifikasi masalah secara konseptual, tetapi juga menjelaskan implikasi kebijakan BOSP bagi madrasah di Kecamatan Babat Supat. Ini memberikan perspektif yang lebih mendalam dibandingkan penelitian terdahulu.
- d. Lokasi dan Konteks Spesifik: Penelitian Peneliti dilakukan di Madrasah Ibtidaiyah Az-Zahra Babat Supat, yang memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya yang unik. Hal ini memberikan kontribusi baru dalam kajian kebijakan pendidikan, terutama di daerah pedesaan atau semi-urban.

2. Kontribusi Penelitian Peneliti

Penelitian Peneliti memberikan beberapa kontribusi signifikan terhadap kajian kebijakan BOSP dan pengembangan madrasah, antara

lain:

a. Kontribusi Teoritis

- 1) Pengayaan Kajian Filosofis Kebijakan: Dengan menjelaskan filosofis perubahan kebijakan BOSP, penelitian Peneliti memberikan lpenelitian teoretis yang lebih kuat tentang mengapa dan bagaimana kebijakan tersebut dirumuskan.
- 2) Identifikasi Problem secara Konseptual dan Implikatif: Peneliti tidak hanya mengidentifikasi masalah, tetapi juga menjelaskan implikasi kebijakan BOSP bagi madrasah. Hal ini memperkaya pemahaman tentang dampak kebijakan pendidikan pada tingkat mikro (sekolah/madrasah).
- 3) Kajian tentang Madrasah Swasta: Penelitian Peneliti mengisi gap dalam literatur tentang implementasi BOSP di madrasah swasta, yang selama ini kurang mendapat perhatian dibandingkan sekolah negeri.

b. Kontribusi Praktis

- 1) Rekomendasi Kebijakan: Hasil penelitian Peneliti dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan BOSP yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan madrasah swasta.
- 2) Peningkatan Kualitas Madrasah: Dengan mengidentifikasi problem dan implikasi kebijakan BOSP, penelitian Peneliti dapat membantu madrasah swasta di Kecamatan Babat Supat untuk

mengoptimalkan penggunaan dana BOSP dan meningkatkan kualitas pendidikan.

3) Pemecahan Masalah Lokal: Penelitian Peneliti memberikan solusi konkret untuk masalah yang dihadapi Madrasah Ibtidaiyah Az-Zahra Babat Supat, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya inovasi, dan tantangan dalam pengelolaan dana BOSP.

c. Kontribusi Metodologis

- 1) Pendekatan Kualitatif yang Mendalam: Penelitian Peneliti menggunakan metode kualitatif yang menekankan pada makna dan konteks lokal. Hal ini berbeda dengan beberapa penelitian terdahulu yang lebih fokus pada aspek administratif atau teknis pengelolaan dana BOS/BOSP.
- 2) Studi Kasus Spesifik: Dengan fokus pada satu madrasah swasta, penelitian Peneliti memberikan gambaran mendalam tentang implementasi kebijakan BOSP di tingkat mikro, yang dapat menjadi referensi untuk studi serupa di lokasi lain.

F. Kerangka Teori

1. Kebijakan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP)

a) Pengertian Kebijakan BOSP

Istilah Kebijakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dasar dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak oleh pemerintah, organisasi dan sebagainya sebagai pernyataan

cita-cita, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam mencapai sasaran.¹⁵

Sedang menurut Kamus Oxford sebagaimana dikutip oleh Saifullah Isri, kebijakan berarti “rencana kegiatan” atau pernyataan-pernyataan tujuan ideal. Lebih lanjut, Saifullah mengatakan bahwa kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah/lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya.¹⁶

Istilah kebijakan dewasa ini sering dan lebih luas dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan pemerintah serta perilaku negara, dimana merupakan suatu aktivitas formal yang diselenggarakan oleh lembaga (baik pemerintah atau masyarakat) yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹⁷ Kebijakan digunakan lebih pada penekanan aturan untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan adanya kebijakan maka akan memberikan rambu-rambu dan arahan bagaimana suatu tujuan itu akan dicapai.

Bantuan Operasional Satuan Pendidikan merupakan salah satu program bantuan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada lembaga pendidikan sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan akses

¹⁵ <https://kbbi.web.id/bijak> (accessed 10 April 2023)

¹⁶ Saifullah Isri, *Kebijakan Pendidikan Islam*, ed. by M.Si Dr. Sabirin (Yogyakarta: Semesta Aksara Jalan, 2021) <https://repository.ar-raniry.ac.id/eprint/18423/1/Kebijakan_Pendidikan_Islam.pdf>.

¹⁷ Fadiyah Elwijaya, Vivi Mairina, and Nurhizrah Gistituati, *Konsep Dasar Kebijakan Pendidikan*, JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia), 6.1 (2021), 67 <<https://doi.org/10.29210/3003817000>>.

dan mutu pendidikan di seluruh negeri. Program ini terutama ditujukan untuk sekolah-sekolah yang memiliki keterbatasan sumber daya, baik dari segi infrastruktur, fasilitas, maupun keuangan. Tujuan utama dari BOSP adalah untuk membantu lembaga pendidikan dalam menjalankan kegiatan operasional sehari-hari dengan lebih lancar dan efisien. Ini penting karena keberlanjutan pembayaran gaji akan memengaruhi motivasi dan kinerja guru dalam memberikan pendidikan kepada siswa. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan: Dana BOSP juga dapat digunakan untuk pengadaan atau perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, seperti gedung sekolah, peralatan pembelajaran, perpustakaan, laboratorium, dan fasilitas lainnya. Dana ini membantu sekolah dalam menjalankan kegiatan operasional sehari-hari tanpa harus bergantung sepenuhnya pada biaya yang dibebankan kepada siswa atau pihak lain. Peningkatan Kualitas Pendidikan: Selain mendukung kegiatan operasional, BOSP juga dapat digunakan untuk berbagai program atau kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, seperti pelatihan guru, pengembangan kurikulum, pengadaan bahan ajar, dan program pembinaan siswa.

Melihat pada pengertian kebijakan di atas, dapat digarisbawahi bahwa kebijakan merupakan aktivitas politik yang dilakukan dengan sengaja berdasarkan pemikiran bijak dan terarah yang dilakukan oleh organisasi, lembaga maupun intansi pemerintah dalam memecahkan permasalahan untuk mendapatkan keputusan yang sesuai dengan tujuan. Misalnya dalam kebijakan pendidikan maka terkait dengan kebijakan publik dibidang

pendidikan yang merupakan suatu produk hukum yang berfungsi sebagai panduan pengambilan keputusan pendidikan yang legal dan netral serta telah disesuaikan dengan kondisi lingkungan pendidikan.

b) Landasan Hukum Kebijakan BOSP

Sejak awal berdiri, komitmen bangsa tergambar jelas dalam UUD 1945 Pasal 31, bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk memperoleh pendidikan. Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan akses pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasal 31 ini merupakan dasar hukum dalam penyelenggaraan pendidikan. Kemudian diperjelas perannya dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dimana undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan sistem pendidikan nasional yang mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan bagi seluruh masyarakat, meningkatkan mutu pendidikan, serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan.¹⁸

Undang-undang di atas diperkuat dengan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan (Permendikbud No. 1 Tahun 2018) tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berisi aturan dan petunjuk teknis terkait BOS dalam meningkatkan mutu pendidikan dan memberikan akses yang lebih merata terhadap pendidikan di Indonesia. Regulasi ini memuat rincian mengenai kriteria penerima bantuan,

¹⁸ Burhan Yusuf Abdul Aziizu, ‘Tujuan Besar Pendidikan Adalah Tindakan’, *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2.2 (2015), 295–300 <<https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.13540>>.

penggunaan dana BOS, tata cara pengawasan dan evaluasi penggunaan dana, dan sebagainya. Permendikbud No. 1 Tahun 2018,¹⁹ serta Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 119/PMK.07/2021²⁰ menjadi dasar bagi pelaksanaan BOS.

Kementerian Agama sejak tahun 2009 telah melakukan perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi program BOP dan BOS yang tidak hanya berorientasi pada perluasan akses, melainkan juga peningkatan mutu pembelajaran di madrasah. Dalam konteks ini, BOSP diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen efektif untuk peningkatan mutu pembelajaran siswa.²¹

Program bantuan operasional pendidikan pada tahun 2022 dan tahun sebelumnya diklasifikasikan ke dalam tiga jenis penamaan, yaitu, BOS (Bantuan Operasional Sekolah), BOP PAUD (Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini), dan BOP Kesetaraan. Ketiga jenis bantuan tersebut adalah sebuah program bantuan operasional yang berdiri sendiri-sendiri yang bersumber dari satu muara yaitu Dana Alokasi Khusus Nonfisik. Pada tahun anggaran 2024, terdapat penggabungan nomenklatur dari Ketiganya menjadi istilah yaitu Bantuan

¹⁹ Kemendikbud, ‘Permendikbud Nomor 1 Tahun 2018’, *Nomor 1 Tahun 2018*, 2018 <<https://bos.kemendikbud.go.id/media/upload/users/5610fb71841ca54bd90ef3be/files/Permendikbud%20Nomor%201%20Tahun%2018.pdf>>.

²⁰ PMK No. 119/PMK.07/2021 merupakan peraturan dari Menteri Keuangan Indonesia tentang pengelolaan dana alokasi non fisik, termasuk dana BOS, yang diterbitkan pada bulan September 2021. Peraturan ini memberikan pedoman pencairan dan pengelolaan alokasi dana non fisik, meliputi kriteria penerimaan dana, alokasi dana, pengelolaan rekening, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi penggunaan dana. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan dana yang efisien dan efektif serta membuat penggunaannya lebih transparan dan akuntabel.

²¹ Dikutip pada web <https://bos.kemenag.go.id/#alur> pada 16 September pukul 21.56 WIB di Yogyakarta

Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).²² Dengan Penggabungan ketiga nomenklatur tersebut bertujuan untuk mempermudah dalam pengalokasian bantuan, tanpa menghilangkan proses dan mekanisme pelaksanaan BOP PAUD, BOS, dan BOP Kesetaraan yang selama ini berjalan.²³

Prinsip keadilan dan pemerataan pendidikan terus dilakukan oleh pemerintah. Sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik yang berada di wilayah dengan tingkat kesetaraan sosial-ekonomi rendah dan memberikan kesempatan yang sama dalam akses pendidikan, maka lahirlah klasifikasi BOS Kesetaraan yang bertujuan memberikan bantuan yang lebih besar dibandingkan dengan BOSP Reguler, untuk memperbaiki sarana dan prasarana dalam proses belajar mengajar serta meningkatkan kualitas pendidikan di satuan pendidikan yang berada di wilayah 3 T (terdepan, terluar, tertinggal) dengan harapan satuan pendidikan di wilayah tersebut dapat memiliki sumber daya yang cukup untuk memperbaiki sarana dan prasarana dalam proses belajar mengajar, meningkatkan kualitas pendidikan, serta memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta didik untuk mendapatkan akses pendidikan yang

²² Dikutip pada web <https://ditsmp.kemdikbud.go.id/intip-kebijakan-bosp-tahun-anggaran-2023/> pada 16 September pukul 21.56 WIB di Yogyakarta

²³ Terdapat dua jenis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan oleh pemerintah, yaitu BOS Reguler dan BOS Kinerja. BOS Reguler merupakan bantuan operasional yang diberikan kepada semua sekolah di Indonesia untuk membiayai kegiatan operasional sekolah, seperti pembayaran gaji guru, pemeliharaan gedung sekolah, dan kegiatan pembelajaran. Alokasi dana BOS Reguler diberikan secara rutin dan merata kepada semua sekolah. Sedang BOS Kinerja adalah bantuan operasional yang diberikan hanya kepada sekolah yang memiliki kinerja baik dalam mencapai target pembelajaran. Alokasi dana BOS Kinerja diberikan kepada sekolah berkinerja baik, sehingga jumlahnya bisa berbeda-beda antara satu sekolah dengan sekolah lainnya.

layak.

Ada beberapa yang beda dalam Kebijakan BOS pada tahun 2022,2023,2024 meskipun nomornya tetap akan tetapi terdapat perubahan substansinya dan untuk tahun anggaran 2024 Berdasarkan (Permendikbud) Nomor 63 Tahun 2022 dan 2023, antara lain: 1). Penggabungan nomenklatur menjadi BOSP. 2). Satuan biaya yang bervariasi untuk BOP Kesetaraan tahun 2024, satuan biaya BOP Kesetaraan berbeda antarwilayah, dihitung berdasarkan indeks kemahalan konstruksi (IKK) tiap wilayah kabupaten/kota. Artinya antara papua dengan pulau sumatera bisa terjadi perbedaan nominal bantuan yang didapat. 3). JUKNIS sebelumnya membatasi usia peserta didik hingga 24 tahun. Namun, JUKNIS 2024 menghapus batasan ini, memungkinkan peserta didik di atas usia tersebut tetap memenuhi syarat untuk menerima honor. 4). Pasal 51 juga mengalami perubahan pada JUKNIS BOS Tun 2024. Komponen penggunaan 50% dari Bos Kinerja, yang sebelumnya terdapat di Pasal 51, digeser ke Pasal 52a. Pada saat yang sama, persyaratan rapat realisasi minimal 50% pada penerimaan tahap 1 juga ditambahkan. 5). Perubahan penting terjadi pada prasyarat penerima honor, terutama untuk Bos Reguler. Peserta didik harus tercatat di Tapue, memiliki NUPTK, dan belum mendapatkan tunjangan profesi. namun, untuk Bos PAUD, kriteria penerimaan honor melibatkan catatan di Dapo-Dik, surat penugasan, surat pengangkatan, serta ketentuan aktif melaksanakan tugas dan belum menerima gaji pokok. JUKNIS BOS Tun

2024, meskipun tetap dengan nomor yang sama, membawa sejumlah perubahan yang perlu dipahami oleh semua pihak terkait pendidikan. Perubahan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari manajemen sekolah luar biasa, batasan usia peserta didik, komponen honor, hingga persyaratan penerimaan honor. Pemahaman mendalam terhadap setiap perubahan akan membantu para pemangku kebijakan dan praktisi pendidikan dalam mengelola dana BOS dengan lebih efektif sesuai dengan regulasi terbaru.

6). Kriteria penerima BOS Kinerja Prestasi dan BOS/BOP Kesetaraan Kinerja Berkemajuan Terbaik mengalami perubahan. Penerima Program Sekolah Penggerak dan SMK Pusat Keunggulan. Mekanisme dalam penyaluran dana BOSP Reguler saat ini dilakukan hanya 2 tahap.²⁴

1) Tujuan Pelaksanaan BOS

Tujuan dari Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) adalah membantu pembiayaan operasional Madrasah, sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus memperluas akses pendidikan masyarakat. BOS ditujukan untuk mengurangi beban biaya pendidikan, sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Secara lebih rincin Program Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) memiliki beberapa tujuan, di antaranya adalah:²⁵

a) Meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah di seluruh

²⁴ Dikutip <https://ditsmp.kemdikbud.go.id/intip-kebijakan-bosp-tahun-anggaran-2024/> pada 16 September pukul 21.56 WIB di Yogyakarta

²⁵ Hetti F. Manurung and Achmad Hidir, 'Pelaksanaan Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)', *Jurnal Kebijakan Publik*, 4.2 (2013), 187–90.

Indonesia.

- b) Menjamin akses dan kesetaraan pendidikan bagi seluruh peserta didik di Indonesia.
- c) Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan di Indonesia.
- d) Membantu membiayai kebutuhan operasional sekolah yang meliputi pembelian buku, alat tulis, kebutuhan administrasi, perbaikan dan perawatan sarana dan prasarana, dan lain sebagainya.
- e) Meningkatkan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan di sekolah-sekolah.

Tujuan-tujuan tersebut, diharapkan program BOS dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan cara memberikan dukungan pembiayaan kepada sekolah-sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menjamin pemerataan kesempatan pendidikan bagi seluruh siswa di Indonesia.

2) Prinsip dasar pelaksanaan BOS

Ada beberapa prinsip dalam pengelolaan dana BOSP yang bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan dana BOSP dilakukan dengan tepat sasaran dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, prinsip-prinsip tersebut juga membantu dalam meminimalkan risiko penyalahgunaan dana BOS dan meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Karena itu dalam Petunjuk Teknis Pengelolaan dana BOSP

Madrasah didasarkan pada beberapa prinsip, yaitu:²⁶

- a) Pertama, prinsip fleksibilitas, sesuai dengan kebutuhan Madrasah berdasarkan hasil Evaluasi Diri Madrasah (EDM) yang telah dilakukan.
- b) Kedua, prinsip efektivitas, penggunaan dana BOSP diupayakan memberikan hasil dan pengaruh untuk mencapai tujuan pendidikan, serta apakah penggunaan dana BOS telah terukur dan menyeluruh untuk memberikan manfaat yang optimal bagi pelaksanaan pendidikan.
- c) Ketiga, prinsip efisiensi, penggunaan dana BOSP yang terbatas mampu meningkatkan kualitas belajar secara optimal.
- d) Keempat, prinsip akuntabilitas, penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan. Ini penting dilakukan guna memberikan informasi yang transparan dan akuntabel kepada masyarakat dalam pengelola pendidikan secara keseluruhan sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat.
- e) Kelima; transparansi, penggunaan dana dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan dan Madrasah.

3) Tata Cara Pelaksanaan BOS

Alur pelaksanaan terstruktur sangat penting dalam pengelolaan

²⁶ Kasubdit Kelembagaan and Direktur Kskk, *Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 304 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6601 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Penyelenggaran Raudhatul Athfal Dan Bantuan* (Indonesia, 2023).

Bantuan Operasional Sekolah (BOSP), karena bertujuan memastikan bahwa dana BOS dapat digunakan secara efektif dan efisien. Dengan alur pelaksanaan yang jelas, setiap tahapan dalam pengelolaan dana BOSP dapat dilakukan dengan tepat waktu dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan dana atau kesalahan dalam penggunaan dana BOS. Selain itu, alur pelaksanaan yang jelas juga dapat memudahkan Kepala Madrasah dan Dinas Pendidikan dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan dana BOS.

Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Tahun Anggaran 2024 menyediakan panduan tentang alur pelaksanaan yang harus diikuti oleh Kepala Madrasah dan Dinas Pendidikan dalam mengelola dana BOS. Secara umum Tatalaksana Bantuan Operasional Sekolah (BOSP) melalui beberapa tahapan, yaitu:²⁷

- a) Pengajuan permohonan: Kepala Madrasah mengajukan permohonan penyaluran dana BOS ke Dinas Pendidikan setempat dengan melampirkan dokumen persyaratan yang telah ditetapkan.
- b) Verifikasi dan validasi data: Kementerian Agama dalam hal ini Direktorat Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan (KSKK) melakukan verifikasi dan validasi data permohonan yang diajukan oleh Kepala Madrasah.

²⁷ *Ibid*

- c) Pencairan dana: Setelah data permohonan diverifikasi dan divalidasi, Dinas Pendidikan mencairkan dana BOS ke rekening Madrasah penerima.
- d) Penggunaan dana: Dana BOS digunakan untuk membiayai operasional madrasah, termasuk pembelian buku-buku pelajaran, alat tulis, seragam sekolah, biaya listrik dan air, serta gaji guru dan tenaga kependidikan.
- e) Pelaporan pertanggungjawaban: Madrasah melalui kepala madrasah dan bendahara wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS setelah pekerjaan selesai atau pada akhir tahun anggaran.

Dalam penetapan alokasi Dana BOSP dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu:²⁸

- a) Direktorat KSKK melakukan proses pengajuan dan permohonan berdasarkan data siswa pada EMIS 4.0 kepada Sekretariat Ditjen Pendidikan Islam sebagai pengajuan pagu alokasi BOS Tahun Anggaran 2024.
- b) Ditjen Pendidikan Islam melakukan penetapan data siswa penerima BOS berdasar data EMIS 4.0 madrasah.
- c) Direktorat KSKK Madrasah menetapkan pagu alokasi BOSP berdasarkan data.
- d) Jumlah alokasi BOSP ke Kantor Kementerian Agama.

²⁸ *Ibid.*

- e) Kantor Kementerian Agama melakukan verifikasi terhadap Jumlah alokasi.
- f) Setelah verifikasi ke Direktorat KSKK Madrasah selesai dilakukan penetapan alokasi final.
- g) Alokasi final disampaikan ke Bank Penyalur untuk dilakukan pencairan dana BOSP Madrasah.

Dalam Penyaluran dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) bagi Madrasah Swasta dilakukan oleh Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Islam atau sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Sedang proses penyaluran dan pencairan dana BOS dilakukan setelah alokasi dana telah ditetapkan dan verifikasi telah dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama. Dana BOS kemudian dicairkan ke rekening masing-masing Madrasah Swasta untuk digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²⁹

2. Pengembangan Madrasah

a) Pengertian Pengembangan Madrasah

Istilah mengembangkan berasal dari kata kembang memiliki arti diantaranya; membuka lebar-lebar; membentangkan; menjadikan besar; menjadikan maju. Pengembangan dalam KBBI diartikan menjadikan besar dan maju. Pengembangan secara umum diartikan sebagai pola pertumbuhan, perubahan secara perlahan (evolution) dan perubahan secara

²⁹ *Ibid*

bertahap.³⁰

Menurut Hasibuan Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, Konseptual, dan Moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan melalui latihan. Sedangkan menurut Abuddin Nata sebagaimana dikutip Imron Fauzi, bahwa pengembangan tersebut terkait dengan upaya memperbaiki, meningkatkan, dan memajukan suatu kegiatan dari keadaan yang kurang maju kepada keadaan yang lebih maju. Dalam bidang pendidikan, pengembangan dapat dilakukan pada seluruh komponen pendidikan, antara lain pengembangan sumber daya manusia (khususnya guru), pengembangan kurikulum dan materi pelajaran, pengembangan proses belajar mengajar, pengembangan sarana prasarana dan sebagainya.³¹

Pengembangan Madrasah mengacu pada pengembangan dan peningkatan sekolah keisalamahan atau lembaga pendidikan yang berpenelitian ajaran Islam. Ini dapat melibatkan berbagai aspek seperti pengembangan kurikulum, pelatihan guru, dan keterlibatan masyarakat. Tujuan utamanya adalah untuk menyediakan pendidikan berkualitas tinggi yang selaras dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam.³²

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, dapat ditarik

³⁰ Diakses melalui <https://kbki.kemdikbud.go.id/entri/mengembangkan> pada 8 Oktober 2024 pukul 10.40 WIB di Yogyakarta

³¹ Imron Fauzi, *Manajemen Pendidikan ala Rasulullah* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 66-67

³² Agustina buchari, ‘Merancang Pembangunan Madrasah Unggul’. *Journal of Islamic Education Policy* 2016, Vol.1, No.2, 95—112

kesimpulan bahwa pengembangan madrasah merupakan usaha yang dilakukan secara sadar, terencana, terarah untuk membuat atau memperbaiki sebuah madrasah yang semakin bermanfaat, untuk meningkatkan kualitas dan menciptakan mutu peserta didik yang lebih baik.

b) Prinsip-prinsip dalam Pengembangan Madrasah

Dalam pengembangan madrasah sebagai tolok ukur peningkatan mutu pendidikan yaitu terdapat dalam rencana kerja baik jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di madrasah dan membuat madrasah dapat bersaing dengan lembaga pendidikan umum lainnya. Dalam Pengembangan madrasah ada beberapa aspek, seperti; manajemen, kurikulum, sumber daya manusia, dan infrastruktur, pemberian pelatihan dan pendidikan kepada guru dan staf, peningkatan fasilitas dan teknologi pendidikan, serta pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan peserta didik dengan dunia kerja.

Keberhasilan perkembangan madrasah tentu tidak bisa lepas dari penjaminan mutu di madrasah sendiri sehingga akan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Karena itu lembaga pendidikan Islam harus mampu bersaing dengan lembaga pendidikan lain dengan menitikberatkan pada mutu pendidikan yang meliputi perencanaan, proses, dan evaluasi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Prinsip-prinsip dalam pengembangan Madrasah dapat meliputi:

- 1) Relevansi; Kurikulum Madrasah harus relevan dengan kebutuhan peserta didik, baik dalam mempersiapkan untuk dunia kerja maupun dalam menghadapi perubahan sosial dan teknologi.
- 2) Fleksibilitas; Kurikulum Madrasah harus fleksibel agar dapat disesuaikan dengan perubahan sosial dan teknologi serta kebutuhan peserta didik yang berbeda.
- 3) Pembelajaran Berbasis Kompetensi; Madrasah harus menerapkan pembelajaran berbasis kompetensi yang mempersiapkan siswa dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk sukses di dunia kerja.
- 4) Integrasi TIK; Madrasah harus mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) ke dalam kurikulum untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan digital dan melengkapi mereka dengan keterampilan yang dibutuhkan di era digital.
- 5) Evaluasi Berkala; Madrasah harus melakukan evaluasi berkala terhadap kurikulum untuk memastikan pengembangan yang terus-menerus sesuai dengan kebutuhan siswa dan perkembangan zaman.
- 6) Keterlibatan Komunitas; Madrasah harus melibatkan komunitas dalam pengembangan kurikulum untuk memastikan relevansi dan kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat lokal.

c) Indikator Pengembangan Madrasah

Indikator pengembangan madrasah dapat berbeda-beda tergantung pada program atau rencana pengembangan yang ditetapkan oleh setiap madrasah. Namun, terdapat beberapa indikator yang umumnya digunakan sebagai acuan dalam mengukur kemajuan dan kualitas pengembangan madrasah, di antaranya:³³

1. Peningkatan kualitas SDM di madrasah, seperti guru dan staf pengelola, melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi.
2. Peningkatan mutu pembelajaran di madrasah, baik dari segi kurikulum, metode pembelajaran, maupun teknologi pendidikan.
3. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran di madrasah, seperti perpustakaan, laboratorium, dan fasilitas olahraga.
4. Peningkatan kualitas pengelolaan dan tata kelola madrasah, seperti manajemen keuangan yang baik dan keterbukaan informasi.
5. Peningkatan partisipasi dan dukungan masyarakat dalam pengembangan madrasah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

³³ Agustini Buchari & Erni Moh. Saleh, "Merancang Pengembangan Madrasah Unggul," *Journal of Islamic Education Policy* 1, no. 2 (Desember 2016): 95-112, <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/jiep>.

3. Peta Konsep

Gambar 1.1 Peta Konsep Kerangka Teori Penelitian



G. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian adalah proses penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan terkontrol dengan tujuan untuk memperoleh informasi baru atau memecahkan masalah yang ada.³⁴ Adapun cara yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis metode kualitatif, dimana proses penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menjelaskan fenomena secara mendalam. Metode yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian kualitatif berfokus pada interpretasi data dan

³⁴ MA Dr. Umar Sidiq, M.Ag Dr. Moh. Miftachul Choiri, "Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan", *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2019, LIII <<http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/METODE PENELITIAN KUALITATIF DI BIDANG PENDIDIKAN.pdf>>.

pemahaman yang lebih dalam tentang konteks sosial, budaya, dan psikologis dengan merujuk pendapat para ahli yang kemudian dikembangkan menjadi pemecahan atas masalah yang ditemukan lalu diajukan untuk mendapatkan verifikasi dalam bentuk dukungan data empiris dilaporan.

Peneliti memilih penelitian kualitatif dengan pertimbangan bahwa dalam penelitian kualitatif memiliki karakter fleksibilitas dalam desain penelitian sehingga peneliti dapat mengumpulkan data dengan cara yang lebih adaptif tergantung pada perkembangan dan temuan penelitian. Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk menyesuaikan pendekatan penelitian selama proses penelitian berlangsung dalam melakukan penelitian Kebijakan Bantuan Oprasional Satuan Pendidikan (BOSP) Madrasah Tahun 2024 dan implikasinya terdapat Pengembangan Madrasah Swasta. Dengan harapan peneliti dapat mendapatkan data-data mengenai Prespektif kebijakan BOSP dan implikasinya terhadap pengembangan pengelolaan madrasah swasta. Selain itu menganalisa secara mendetail sudahkah sesuai dengan panduan teknis Bantuan Operasional satuan Pendidikan BOSP yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Nomor 304 Tahun 2023 atau belum. Oleh karena itu, penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang lebih tepat dalam penelitian ini.

Sedangkan dalam pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif Kualitatif. Dimana dalam penelitian ini peneliti ingin membangun asusmsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif, kebenaran itu

dinamis dan dapat ditemukan hanya melalui penelaahan. Dalam penelitian peneliti, penelitian ini ingin melihat dan mendeskripsikan situasi sosial berupa implikasi kebijakan Dana Bantuan Satuan Pendidikan BOSP sebagai pengembangan madrasah ibtidaiyah az-zahra di Kecamatan Babat Supat.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Ibtidaiyah Az-zahra yang berada di Wilayah Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Adapun waktu penelitian telah dilaksanakan pada bulan Mei untuk observasi awal dan diselesaikan pada Juli 2024.

3. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian pada penelitian ini merujuk pada metode, teknik, atau alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Instrumen-instrumen tersebut sangat penting dalam memastikan bahwa data yang dikumpulkan relevan, akurat, dan dapat dipenelitian.

Dalam penelitian ini ada beberapa instrumen yang digunakan diantaranya yaitu: Pertama, Kuesioner (Daftar pertanyaan yang harus diisi oleh responden, baik dalam bentuk pilihan gjeneliti, skala likert, atau pertanyaan terbuka). Kedua, Pedoman wawancara (Daftar pertanyaan atau topik yang akan dibahas dalam wawancara dengan responden) dan ketiga, Lembar observasi (Daftar kategori atau item yang harus diamati dan dicatat selama observasi).

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan untuk Kepala Madrasah

A. Terkait Pengelolaan Kebijakan BOSP Madrasah

1. Bagaimana alur pengelolaan dana BOSP di MI Az Zahra pada tahun 2024, mulai dari perencanaan hingga evaluasi?
2. Apa langkah strategis yang diambil dalam menentukan prioritas penggunaan dana BOSP?
3. Bagaimana sistem pelaporan dan transparansi penggunaan dana BOSP kepada masyarakat dan pihak terkait?
4. Apa tantangan terbesar dalam mengelola dana BOSP, baik secara teknis maupun administratif?
5. Bagaimana kebijakan BOSP diintegrasikan dengan kebutuhan pendidikan di MI Az Zahra?
6. Apa bentuk pengawasan yang dilakukan untuk memastikan penggunaan dana sesuai dengan aturan?
7. Bagaimana keterlibatan dewan guru dan masyarakat dalam pengelolaan kebijakan BOSP?

B. Terkait Faktor Keberhasilan Kebijakan BOSP

8. Apa indikator keberhasilan pengelolaan dana BOSP menurut Anda?
9. Bagaimana kebijakan BOSP berkontribusi pada pengembangan fasilitas, tenaga pendidik, dan kualitas pembelajaran?
10. Apakah ada inovasi atau pendekatan khusus yang diterapkan untuk memaksimalkan dampak BOSP di MI Az Zahra?
11. Bagaimana kebijakan BOSP membantu meningkatkan kesejahteraan siswa, seperti pembebasan biaya pendidikan atau dukungan kebutuhan belajar lainnya?

Pertanyaan untuk Dewan Guru (Informan Pendukung)

A. Terkait Pengelolaan Kebijakan BOSP Madrasah

1. Bagaimana keterlibatan Anda dalam perencanaan dan pelaksanaan penggunaan dana BOSP?
2. Apakah kebijakan BOSP sudah memenuhi kebutuhan pembelajaran di MI Az Zahra? Jika ya, bagaimana?
3. Bagaimana komunikasi antara kepala madrasah dan guru terkait pengelolaan dana BOSP?
4. Apakah ada kendala yang Anda rasakan dalam penerapan kebijakan BOSP? Jika ada, bagaimana solusinya?

B. Terkait Faktor Keberhasilan Kebijakan BOSP

5. Apa pengaruh kebijakan BOSP terhadap peningkatan kualitas pembelajaran di kelas?
6. Bagaimana kebijakan ini membantu dalam pengadaan alat peraga, bahan ajar, atau pelatihan guru?
7. Apa dampak BOSP terhadap kesejahteraan guru dan kualitas profesionalisme Anda?
8. Menurut Anda, apa yang perlu ditingkatkan dalam pengelolaan kebijakan BOSP untuk mendukung pengembangan MI Az Zahra?

Pertanyaan untuk Orang Tua Siswa dan Masyarakat (Informan Pendukung)

A. Terkait Pengelolaan Kebijakan BOSP Madrasah

1. Apakah Anda mengetahui tentang kebijakan dana BOSP yang diterapkan di MI Az Zahra?
2. Bagaimana pendapat Anda mengenai pengelolaan dana BOSP oleh madrasah?
3. Apakah Anda pernah dilibatkan dalam evaluasi atau diskusi terkait penggunaan dana BOSP?

4. Bagaimana informasi penggunaan dana BOSP disampaikan kepada orang tua atau masyarakat?

B. Terkait Faktor Keberhasilan Kebijakan BOSP

5. Menurut Anda, apakah kebijakan BOSP telah memberikan manfaat nyata bagi siswa di MI Az Zahra? Jika ya, apa saja contohnya?
6. Apa dampak kebijakan ini terhadap fasilitas, pembelajaran, atau akses pendidikan bagi anak Anda?
7. Apa harapan Anda terkait pengelolaan dana BOSP ke depannya?
8. Apakah ada hal yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan kebijakan BOSP di madrasah ini?

4. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian adalah individu atau kelompok yang memberikan informasi atau data yang relevan dengan tujuan penelitian. Informan dapat menjadi sumber data yang berharga yang relevan dengan topik penelitian. Peran informan memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti. Informan dapat memberikan wawasan, ppenelitian, dan pengalaman yang berharga kepada peneliti. Mereka dapat membantu peneliti memahami konteks sosial, budaya, dan historis dari fenomena yang diteliti. Pemilihan informan harus dilakukan dengan baik dan mempertimbangkan tujuan penelitian serta jenis data yang dibutuhkan. Informan yang dipilih harus dapat memberikan sudut ppenelitian yang beragam dan mendalam terhadap topik penelitian.

Adapun informan penelitian ini dibagi menjadi 2 yaitu:

- a) Informan Utama (Key Informan)

Informan utama adalah sumber utama data atau informasi primer dalam sebuah penelitian. Mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, atau pemahaman yang mendalam terkait dengan topik penelitian yang sedang diteliti. Informan Utama adalah orang atau sekelompok orang yang memiliki informasi yang dibutuhkan.³⁵ Ia merupakan sumber informasi utama dalam penelitian yang menunjukkan kebenaran data dan fakta yang terjadi pada objek penelitian. Dalam penelitian ini key informan adalah Kepala Madrasah se Kecamatan Babat Supat.

b) Informan Pendukung

Instrumen pendukung merupakan sosok yang mendukung keterangan key informan. Informasi yang disampaikan informan pendukung akan membantu menjadi pelengkap atau mungkin menjadi pembanding penting bagi keberlangsungan penelitian. Informan pendukung pada penelitian ini adalah dewan guru dan orang tua siswa, masyarakat.

5. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Selain menganalisis data, peneliti juga harus menguji keabsahan data agar memperoleh data yang valid. Untuk menetapkan keabsahan data tersebut diperlukan teknik pemeriksaan. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. Sebagaimana ppenelitianan Lexy J. Moleong bahwa “triangulasi adalah

³⁵ Suwardi Endraswara. *Metode, Teori, Teknik*, (Sleman: Pustaka Widyatama, 2006) hlm. 121.

teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data sebagai keperluan verifikasi atau validasi. Teknik ini digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memastikan bahwa data yang diperoleh konsisten dan dapat dipercaya sebagai pembanding data.³⁶ Lexy J. Moleong, membedakan tiga macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan kegunaan sumber, teknik, dan waktu, yaitu:³⁷

Peneliti pada penelitian ini memilih teknik keabsahan data dengan menggunakan Triangulasi sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara melakukan pengecekan data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber. Misalnya untuk memastikan keabsahan data yang didapatkan dilakukan pengalian lebih dalam kepada sumber pendukung lain sehingga hasil yang didapat sama

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan yang dilakukan setelah data terkumpul. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data dari hasil wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainnya.³⁸

³⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Karya,2012), hlm. 330

³⁷ Arnild Augina Mekarisce, *Teknik Pemeriksaan Keabsaan Data paa Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat*, Jurnal Ilmiah kesehatan masyarakat Vol 12 Edisi 3, 2020 hlm. 150

³⁸Mardawi, *Praktis Penelitian Kualitatif: Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 63

Menurut Miles, Huberman, dan Saldana, dalam analisis data kualitatif terdapat tiga aktivitas utama yang berjalan secara simultan, yaitu Kondensasi Data (*Data Condensation*), Penyajian Data (*Data Display*), dan Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*). Berikut penjelasannya:

a. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data adalah proses memilih, menyederhanakan, mengabstraksi, atau mengubah data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen, atau materi empiris lainnya. Tujuannya adalah untuk memfokuskan pada informasi yang paling relevan dan signifikan, sehingga memudahkan proses analisis lebih lanjut tanpa menghilangkan esensi data.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data melibatkan pengorganisasian dan penyusunan informasi yang telah dikondensasi ke dalam format yang lebih terstruktur, seperti tabel, grafik, atau matriks. Hal ini memungkinkan peneliti untuk lebih mudah memahami pola, hubungan, atau tren dalam data, serta memfasilitasi pengambilan kesimpulan atau tindakan berdasarkan temuan yang ada.

c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

Penarikan kesimpulan adalah proses mencari makna, pola, penjelasan, atau hubungan sebab-akibat dari data yang telah dikumpulkan dan disajikan. Meskipun kesimpulan awal dapat muncul

selama proses pengumpulan data, kesimpulan akhir biasanya dibentuk setelah data dianalisis secara menyeluruh. Proses ini juga mencakup verifikasi untuk memastikan keabsahan dan keandalan temuan, yang dipengaruhi oleh faktor seperti volume data, metode pengkodean, kecakapan peneliti, dan tuntutan dari pihak pemberi dana.³⁹

Hasil kesimpulan yang diperoleh dari data yang diolah dalam penelitian ini adalah berupa gambaran atau deskripsi mengenai Kebijakan BOSP 2023 dan Implikasinya bagi Madrasah Ibtidaiyah Az-zahra di Kec Babat Supat Musi Banyuasin.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tesis ini mengikuti struktur berikut:

Pada BAB 1 akan membahas diataranya sebagai berikut: 1). Latar Belakang Masalah, dimana dalam latar belakang masalah akan menjelaskan analisis kebijakan BOSP Madrasah Tahun 2024 dan implikasinya terhadap pengembangan Madrasah Swasta di Kecamatan Babat Supat perlu dilakukan. 2). Fokus Masalah adalah inti atau pusat perhatian dari sebuah penelitian sehingga memberikan arahan dan batasan bagi penelitian, Penelitian ini yang menjadi fokus masalah adalah: analisis kebijakan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Madrasah Tahun 2024 dan implikasinya terhadap pengembangan Madrasah Swasta di Kecamatan Babat Supat, dengan mencakup beberapa aspek, yaitu; Evaluasi kebijakan BOSP Madrasah Tahun

³⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 338-345

2024, Dampak BOSP Madrasah terhadap pengembangan Madrasah MI AZ-ZAHRA, 3). Rumusan Masalah dalam merumuskan terdapat pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab dalam analisis kebijakan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Madrasah Tahun 2024. 4). Tujuan Penelitian; mengurai tujuan penelitian ini dilakukan. 5). Manfaat Penelitian. 6). Tinjauan Pustaka. 7). Metode Penelitian. 8) Kerangka Teori .

Pada BAB 2 berisi Tinjauan Pustaka, yang mana dalam pembahasannya diantaranya sebagai berikut: pertama, menjabarkan tentang wacana kebijakan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan baik terkait dengan pengertian kebijakan, lpenelitisan hukum dan kesejarahan lahirnya BOSP, tujuan pelaksanaan program BOSP, prinsip dasar pelaksanaannya dan tata kelola BOS. Dalam bab ini juga mengupas diskursus pengembangan madrasah, dimulai dengan pengertian kemudian mengupas diskursus strategi Pengembangan Madrasah di era global, Prinsip-prinsip dalam Pengembangan Madrasah, Menejemen Pengembangan Madrasah Yang unggul.

Pada BAB 3 berisi materi yang membahas metodologi yang digunakan dalam penelitian ini. Mulai dari dimana Lokasi dan kapan Waktu Penelitian dilakukan. Jenis dan Pendekatan Penelitian yang dilakukan. Kemudian menjelaskan Instrumen yang digunakan dalam Penelitian. Informan Penelitian yang digunakan. Teknik dan Alat Pengumpulan Data. Teknik Pengujian Keabsahan Data. Dan bagaimana Teknik dalam menganalisa Data penelitian.

Bab 4 adalah BAB yang digunakan dalam mengolah data hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan terkait analisis kebijakan

BOSP Madrasah Tahun 2024 dan implikasinya terhadap pengembangan Madrasah Ibtidaiyah Az-zahra di Kecamatan Babat Supat.

Pada BAB V Kesimpulan akan menyajikan ringkasan temuan dan kesimpulan penelitian terkait analisis kebijakan BOSP Madrasah Tahun 2024 dan implikasinya terhadap pengembangan Madrasah Ibtidaiyah Az-zahra di Kecamatan Babat Supat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengelolaan kebijakan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOS) 2024 di MI Az Zahra Babat Supat meliputi berbagai tahapan yang saling berkaitan dalam pengelolaan dana tersebut. Proses dimulai dengan pengajuan permohonan dana, yang menjadi langkah awal untuk memperoleh alokasi dana BOS. Setelah itu, tahap verifikasi dan validasi data dilakukan untuk memastikan kebenaran informasi yang disampaikan. Kemudian, pencairan dana dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, diikuti dengan penggunaan dana yang harus sesuai dengan rencana anggaran yang telah disusun. Tahap akhir adalah pelaporan pertanggungjawaban, di mana sekolah harus menyusun laporan yang menggambarkan penggunaan dana secara transparan dan akuntabel. Seluruh proses ini berperan penting dalam memastikan pengelolaan dana BOS yang efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang ada.
2. Keberhasilan kebijakan BOSP di MI Az Zahra Babat Supat ditentukan oleh beberapa faktor utama, seperti perencanaan yang melibatkan berbagai pihak untuk memastikan kebutuhan madrasah terpenuhi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana, serta pemanfaatannya untuk mendukung pembelajaran, meningkatkan kompetensi guru, dan membantu siswa kurang mampu. Selain itu,

keterlibatan masyarakat dalam pengawasan, pengembangan teknologi pembelajaran, dan upaya mengatasi tantangan pengelolaan dana turut memperkuat efektivitas kebijakan ini dalam mendorong kemajuan madrasah.

B. Saran

1. Saran untuk Guru:

- a. **Peningkatan Kompetensi Profesional:** Guru perlu terus meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan pembelajaran, baik melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak madrasah maupun lembaga pendidikan lainnya. Dengan kompetensi yang lebih baik, penggunaan dana BOS akan lebih maksimal dalam mendukung peningkatan kualitas pembelajaran.
- b. **Inovasi dalam Pembelajaran:** Guru diharapkan untuk lebih kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan dana BOS untuk kegiatan pembelajaran, seperti penggunaan teknologi pendidikan yang dapat memperkaya pengalaman belajar siswa.

2. Saran untuk Orang Tua:

- a. **Peningkatan Keterlibatan dalam Pengawasan:** Orang tua diharapkan lebih aktif dalam mengawasi penggunaan dana BOS dan proses pembelajaran di madrasah. Dengan keterlibatan yang lebih intens, orang tua dapat membantu memastikan bahwa dana yang diterima digunakan sesuai dengan kebutuhan siswa dan madrasah.

b. **Mendukung Kegiatan Pembelajaran:** Orang tua juga dapat berperan dalam mendukung kegiatan pembelajaran, seperti menyediakan fasilitas tambahan untuk anak-anak atau berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan pendidikan yang diadakan oleh madrasah.

3. Saran untuk Kepala Sekolah:

- a. **Peningkatan Kepemimpinan dalam Pengelolaan BOS:** Kepala sekolah perlu memperkuat peranannya dalam memimpin pengelolaan dana BOS dengan memastikan bahwa seluruh proses dari pengajuan permohonan, verifikasi data, hingga pelaporan pertanggungjawaban dilakukan secara transparan, efisien, dan akuntabel.
- b. **Kolaborasi yang Lebih Baik dengan Stakeholder:** Kepala sekolah sebaiknya lebih intensif dalam berkolaborasi dengan guru, orang tua, dan masyarakat dalam merancang kebijakan dan program-program pendidikan yang didanai oleh BOS. Melalui kerjasama yang baik, pengelolaan dana BOS akan lebih terarah dan memberikan dampak positif bagi perkembangan madrasah.

DAFTAR PUSTAKA

Arief Tarmansyah Imam, "Manajemen Mutu Informasi Kesehatan: Quality Assurance," 2017, 169, <http://rsjiwajambi.com/wp-content/uploads/2019/09/Manajemen-Mutu-Informasi-Kesehatan-I-1.pdf>.

Awan Y. Abdoellah, *Analisis Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabet, 2016), 122.

Burhan Yusuf Abdul Aziizu, "Tujuan Besar Pendidikan Adalah Tindakan," *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2.2 (2015), 295-300, <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.13540>.

A. Basyit, "Dikotomi Dan Dualisme Pendidikan Di Indonesia," *Jurnal Tahdzibi: Manajemen Pendidikan Islam*, 4.1 (2019), 15-27, <https://doi.org/10.24853/tahdzibi.4.1.15-28>.

Ella Siti Chaeriah, "Manajemen Berbasis Mutu," *Jurnal Manajemen Bisnis Krisnadwipayana*, 4.2 (2016), 1-9.

Didik Suhardi, Ph.D., "Sejarah Dan Peran BOS Bagi Pendidikan Indonesia," Kemendikbud, <https://jendela.kemdikbud.go.id/v2/berita/detail/sejarah-dan-peran-bos-bagi-pendidikan-indonesia> [accessed 19 March 2023].

Dirjen Pendis, "Juknis Bos Perubahan 2020.Pdf," <https://drive.google.com/file/d/1ocf4fgpVFJMYx4MRJ1IX7QiU4deXyyNr/view>.

Dr. Caswita, M.A.P, *Manajemen Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam* (Deepublish, 2021), <https://books.google.co.id/books?id=a5w9EAAAQBAJ>.

Dr. Umar Sidiq, M.Ag., Dr. Moh. Miftachul Choiri, MA, "Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan," *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2019, liii, <http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/METODE%20PENELITIAN%20KUALITATIF%20DI%20BIDANG%20PENDIDIKAN.pdf>.

Fadiyah Elwijaya, Vivi Mairina, and Nurhizrah Gistituati, "Konsep Dasar Kebijakan Pendidikan," *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6.1 (2021), 67, <https://doi.org/10.29210/3003817000>.

Fatkuroji, "Implementasi Kebijakan Pembelajaran Terpadu Dan Minat Pelanggan Pendidikan," *Jurnaltarbawi*, 2.02 (2017), 28-40.

Niken Ayu Hestina and Dea Melinda, "Kebijakan Kontroversial Mengenai Dana BOS 2021," *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Keguruan*, 7.1 (2022), 25-29, <https://doi.org/10.47435/jpdk.v7i1.994>.

Saifullah Isri, *Kebijakan Pendidikan Islam*, ed. by M.Si Dr. Sabirin (Yogyakarta: Semesta Aksara Jalan, 2021), <https://repository.araniry.ac.id/id/eprint/18423/1/Kebijakan%20Pendidikan%20Islam.pdf>.

Kasubdit Kelembagaan and Direktur Kskk, "Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 304 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6601 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Penyelenggaran Raudhatul Athfal Dan Bantuan," (Indonesia, 2023).

Kemendikbud, "Permendikbud Nomor 1 Tahun 2018," Nomor 1 Tahun 2018, 2018, <https://bos.kemdikbud.go.id/media/upload/users/5610fb71841ca54bd90ef3be/files/Permendikbud%20Nomor%201%20Tahun%202018.pdf>.

Galih W. Pradana Ma'ruf, M. Farid, and Desentralisasi, *Desentralisasi Pendidikan, JOIES: Journal of Islamic Education Studies* (Surabaya: Unesa University Press, 2020).

Hetti F. Manurung and Achmad Hidir, "Pelaksanaan Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)," *Jurnal Kebijakan Publik*, 4.2 (2013), 187-190.

Sri Devi Monica, "Analisis Konsep Kebijakan Publik (Studi Kasus Bantuan Dana Operasional Sekolah (BOS))," *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 5.2 (2022), 155-166, <https://doi.org/10.25139/jmnegara.v5i2.3396>.

Meyga Hidayah Wiranti Mulya and Tjitjik Rahaju, "Evaluasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di Surabaya," *Publika*, 9.3 (2021), 181-194, <https://doi.org/10.26740/publika.v9n3.p181-194>.

Fransisxa Nur'aini, Ikhya Ulumuddin, Lisna Sulinar Sari, and Sisca Fujianita, "Meningkatkan Kemampuan Literasi Dasar Siswa Indonesia Berdasarkan Analisis Data PISA 2018," *Pusat Penelitian Kebijakan*, 3, 2021, 1-10.

NURYADIN, "Strategi Pendidikan Islam Di Era Digital," *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 3.1 (2017), 209, <https://doi.org/10.24952/fitrah.v3i1.637>.

Tahrir Rosadi, "Manajemen Mutu Pendidikan Dalam Upaya Meningkatkan Kemandirian Madrasah," *Cakrawala: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial*, 5.1 (2021), 86-106, <https://doi.org/10.33507/cakrawala.v5i1.287>.

Budhi Adrianto Wiwin Purbaningrum, *Sintesis Hasil Studi Diagnostik Pembelajaran Pendidikan Dasar Di Enam Kabupaten Mitra INOVASI Di Provinsi Nusa Tenggara Barat* (The SMERU Research Institute, 2016), http://www.smeru.or.id/sites/default/files/publication/inovasirr_id.pdf.

Sulaiman Sulaiman, Era Prestorioka, and Mujib Mujib, "Dampak Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Terhadap Partisipasi Pendidikan," *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, 1.1 (2020), 37, <https://doi.org/10.26418/jppkn.v1i1.40613>.

I Made Astra Winaya, Putu Edy Purna Wijaya, I Nengah Sudiarta, and I Made Sutika, "Analisis Prisip-Prinsip Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Dalam Program Merdeka Belajar," *Widya Accarya*, 13.2 (2022), 133-144, <https://doi.org/10.46650/wa.13.2.1277.133-144>.

Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 2016, vi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA